



Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki

Impact The state is controlled by political parties and oligarchs

Yusri¹, Jenda Ingan Mahuli^{2*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana Medan

²Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding Author^{*}: jendainganmahuliketaren1208@gmail.com

Abstrak.

Tujuan karya tulis ini untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait dampak hukum dan Negara jika dikendalikan oleh oligarki. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kesadaran bersama untuk dapat bersungguh-sungguh mengendalikan pengaruh oligarki. Metode penulisan karya ilmiah ini dengan membaca berbagai sumber informasi terpercaya, peraturan pemerintah dan buku referensi. Kemudian hasilnya dirangkai sesuai dengan topik bahasan dengan memberikan narasi yang bersifat memberikan informasi dan saran. Hasil bahasannya adalah bahwa Oligarki memiliki dampak yaitu: 1) Menghilangkan Hak Partisipasi Warga Negara, 2) Terancamnya Kesejahteraan Masyarakat. Oligarki akan sulit untuk dihapuskan sebab pelaku oligarki adalah orang-orang yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara dan partai politik dan bahkan aparat negarapun ada yang termasuk dalam kelompok pelaku oligarki. Akan tetapi Oligarki dapat dikendalikan salah satunya melalui pengawasan bersama antara negara, akademisi dan masyarakat.

Kata Kunci : Dampak; Hukum; Partai Politik; Oligarki.

Abstract

The purpose of this paper is to provide explanations and information regarding the impact of law and the state if it is controlled by an oligarchy. This of course greatly influences the collective awareness to be able to seriously control the influence of the oligarchy. The method of writing scientific papers is by reading various reliable sources of information, government regulations and reference books. Then the results are arranged according to the topic of discussion by providing narratives that provide information and suggestions. The results of the discussion are that the oligarchy has impacts, namely: 1) Eliminates Citizens' Participation Rights, 2) Threats to Community Welfare. It will be difficult to abolish oligarchy because the perpetrators of the oligarchy are people who have an important role in the country's economy and political parties and even state apparatus are included in the group of oligarchs. However, oligarchy can be controlled one way or another through joint supervision between the state, academics and society.

Keywords: Impact; Law; Political parties; Oligarchy.

PENDAHULUAN

Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara yang kekuasaannya dipegang oleh kelompok tertentu. Kelompok ini biasanya berasal dari orang-orang dengan pengaruh yang kuat, bisa dilihat dari kekayaan, pendidikan, hingga hubungannya dengan pemerintahan bahkan militer. Sebenarnya, oligarki bukanlah merupakan sistem resmi pemerintahan sebuah negara, melainkan hanya sebuah jalan yang dipergunakan oleh sebuah kelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri. Bisa dikatakan, kekayaan adalah kunci dari oligarki itu sendiri.

Kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk mencapai puncak kekuasaan melalui cara yang beragam untuk melipatgandakan kekayaan dan kekuasaannya. Itulah kenapa pada akhirnya hak-hak milik rakyat kecil menjadi dikesampingkan bahkan tidak dipedulikan.

Menurut Ismayani, dkk (2022), bahwa: 1) Pengaruh oligarki terhadap demokrasi di Indonesia sudah memasuki tahap memprihatinkan sebab Demokrasi semestinya mampu menjadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tanpa demos tentu merupakan anomali, atau bahkan kontradiktif yang kita tahu bahwa seharusnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat bukan malah berbalik kepada para pejabat ataupun oligarki politik. 2) Apabila Oligarki masuk ke dalam proses politik akan menghilangkan hak partisipasi warga negara. Selanjutnya, masuknya oligarki dalam hasil proses politik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Artinya, akan berdampak bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Tujuan karya tulis ini untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait dampak hukum dan Negara jika dikendalikan oleh oligarki. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kesadaran bersama untuk dapat bersungguh-sungguh mengendalikan pengaruh oligarki.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. (Sugiyono, 2015:22). Metode penulisan karya ilmiah ini dengan membaca berbagai sumber informasi terpercaya, peraturan pemerintah dan buku referensi. Kemudian hasilnya dirangkai sesuai dengan topik bahasan dengan memberikan narasi yang bersifat memberikan informasi dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial oleh Abdur Rozaki (2021), oligarki berasal dari bahasa Yunani yaitu *oligarchia* yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit. *Oligo* berarti sedikit dan *archein* berarti memerintah. Dari istilah tersebut, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang politik kekuasaannya berada di tangan minoritas kecil. Menurut Endik Hidayat dari buku *Oligarki Dalam Kekuasaan di Pilkadaes*, oligarki berorientasi pada kepentingan pribadi.

Definisi di atas menegaskan bahwa tujuan penggunaan kekuasaan yang utama bukanlah untuk masyarakat. Kekuasaan dengan demikian menjadi sesuatu yang 'elitist' dan tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk menikmatinya.

Suatu organisasi cenderung mengarah ke oligarki karena secara ilmiah kekuasaan akan jatuh ke tangan segelintir kecil pimpinan dan mendorongnya menjadi birokratis. Organisasi tersebut memiliki sifat konservatif sehingga semakin kompleks dan mengarah menjadi oligarki.

Ciri Sistem Oligarki

Melansir dari buku *Oligarki 2020* oleh Agus Riswanto, terdapat beberapa ciri-ciri tertentu yang hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan oligarki. Beberapa ciri-ciri tersebut antara lain:

1. Kekuasaan Dipegang atau Dikendalikan oleh Kelompok Kecil Masyarakat
Ciri-ciri pertama dari sistem pemerintahan oligarki yang paling terlihat yaitu kepemimpinan dipegang oleh suatu kelompok kecil masyarakat. Sebagian besar kelompok kecil ini memiliki uang, dan dapat dengan mudah masuk ke dalam pemerintahan karena mempunyai uang serta kekayaan.
2. Terjadi Ketidaksetaraan dari Segi Material yang Cukup Ekstrem
Sistem pemerintahan oligarki bisa terjadi karena adanya kesenjangan dalam hal material yang ekstrim di masyarakat. Orang-orang kaya akan terlihat menonjol jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki uang.
3. Berkaitan Erat dengan Uang dan Kekuasaan
Diunggah dari buku *Sistem Politik Indonesia* oleh Humairah Almahdali, dkk, ciri sistem pemerintahan oligarki yang paling mendasar adalah memiliki kaitan erat dengan uang dan kekuasaan. Hal itu akan digunakan untuk semakin mengokohkan kekuasaan dan kekayaan kelompok tersebut.
4. Kekuasaan Menjadi Kunci Melestarikan Kekayaan

Kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berkuasa dijadikan sebagai sarana untuk menambah kekayaan sepihak. Hak bagi rakyat kecil bukanlah menjadi tujuan utama kelompok ini.

Dampak Pemerintahan Oligarki

Dilansir dari situs komnasham.go.id, adanya sistem oligarki ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi rakyat dan negara yang bersangkutan. Berikut adalah dampak pemerintahan oligarki:

1. **Menghilangkan Hak Partisipasi Warga Negara**

Jika sebuah negara mengalami atau menganut sistem pemerintahan oligarki, maka hal pertama yang akan terjadi adalah munculnya ancaman hak partisipasi warga negara. Kondisi ini bisa saja terjadi karena masuknya pengaruh oligarki ke dalam proses politik negara tersebut. Hasilnya, proses politik yang berlangsung akan dipegang secara penuh oleh kelompok yang berkuasa. Sehingga rakyat-rakyat kecil kehilangan hak partisipasinya sebagai warga negara.

2. **Terancamnya Kesejahteraan Masyarakat**

Ancaman atau dampak pemerintahan oligarki selanjutnya yakni terganggunya kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Kondisi ini bisa saja terjadi akibat pengaruh ikut campur tangan orang-orang berkuasa yang ingin melestarikan kekayaannya.

Contoh Negara dengan Sistem Oligarki

Mengutip dari makalah *Pengertian dan Bentuk-bentuk Pemerintahan* oleh Shara Puspita Sari, contoh negara yang pernah menganut bentuk oligarki salah satunya adalah Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden. Orang-orang berkulit putih berhasil menguasai mayoritas penduduk Afrika Selatan, masalah rasisme ini disebut juga dengan apartheid. Selain Afrika Selatan, ada beberapa negara yang menerapkan oligarki. Mengutip dari uinjkt.ac.id, negara-negara tersebut adalah Korea Utara, Turki, Rusia, Cina, Ukraina, Arab Saudi, Zimbabwe, Iran, dan juga Amerika Serikat. Oligarki di negara-negara tersebut terbentuk di antara oligar ekonomi-finansial, yaitu orang yang sangat kaya (super rich) atau kaya (the rich) yang memiliki jalinan persekongkolan kuat dengan oligarki politik. Oligarki di Amerika Serikat, seperti korporasi besar, sangat menentukan dalam pembuatan keputusan politik dibandingkan dengan suara dari masyarakat kecil. Oligarki berbeda dengan kaum elite. Elite belum tentu oligarki, namun kelompok oligarki biasanya merupakan seorang elite. Mereka

yang termasuk ke dalam oligarki politik biasanya sering mengambil keputusan menyangkut kepentingan publik di dalam lingkaran mereka sendiri.

Kesimpulannya, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dibuat oleh kelompok elit untuk melipatgandakan kekayaannya masing-masing.

Oligarki, menurut Jeffrey (2014), adalah upaya politik untuk mempertahankan kekayaan atau kemakmuran. Hubungan erat antara upaya politik itu dan demokrasi juga tergambarkan dengan munculnya pola ketimpangan yang makin dalam di sejumlah negara demokrasi. Ketimpangan itu menunjukkan dominasi oligarki ke dalam demokrasi. Fenomena itu terjadi di Indonesia, termasuk juga di Amerika Serikat saat ini. "Indonesia tahun 1960-an jauh lebih setara daripada sekarang, di mana ketimpangan saat ini makin dalam. Di AS juga terjadi hal yang sama. Saat ini di sana kekayaan tiga orang setara dengan kekayaan 50 persen populasi. Di satu sisi, demokrasi memang berkembang, tetapi ketidaksetaraan yang laten di dalam pola relasi kuasa itu terkunci (tidak hilang). Ketimpangan di Indonesia memang tidak seekstrem itu, tetapi Indonesia menuju ke sana.

Apa yang menjadi titik lemah dari praktik demokrasi saat ini tentu tidak diinginkan atau mungkin tidak terbayangkan oleh Aristoteles sebelumnya. Namun, lanjut Jeffrey, untuk mengendalikan itu semua, pembatasan terhadap intervensi oligarki ke dalam politik dan hukum mesti dilakukan. Jika itu tidak dilakukan, dominasi kekayaan (wealth) akan mengooptasi sistem politik dan hukum, dan pola kesetimbangan relasi kuasa yang berupaya dibangun dengan demokrasi itu akan terancam.

Jeffrey mengatakan, apa yang membedakan kondisi demokrasi satu negara dengan negara lainnya ialah sejauh mana oligarki itu bebas untuk memengaruhi proses demokrasi dan hukum. Menghilangkan oligarki sepenuhnya dinilai tidak mungkin karena demokrasi sendiri dibangun untuk menciptakan kesetimbangan atau memoderasi kepentingan kelompok kaya dengan kepentingan rakyat kebanyakan.

"Ketika demokrasi didesain untuk mengompromikan antara kepentingan few (kelompok kecil yang kaya) dan many (masyarakat kebanyakan yang umumnya tidak kaya), maka demokrasi didesain untuk mempertahankan keduanya. Menghilangkan salah satunya tentu tidak mudah," katanya.

Indonesia sangat rentan dengan intrusi oligarki di dalam demokrasi dan sistem hukumnya karena sejumlah faktor.

1. Sebagai negara demokrasi baru, kemampuan masyarakat sipil (civil society) masih terbatas dan tidak mampu mengimbangi kapasitas yang dimiliki oleh kelompok oligarki.

2. Kekayaan terkonsentrasi dengan cepat di kelompok kecil masyarakat di Indonesia, yang semuanya itu dapat digunakan untuk berbagai agenda, termasuk tujuan politik. Sistem politik Indonesia yang sangat transaksional mencerminkan kondisi itu.
3. Indonesia tidak memiliki badan atau institusi yang sah untuk mencegah oligarki mengontrol partai atau faktor-faktor elektoral lainnya. Dengan mudahnya pemilik modal mendirikan partai politik, yang pendanaannya bersifat top-down (dari atas ke bawah) oleh oligark bersangkutan. Tidak ada parpol yang dibiayai bottom up (dari bawah ke atas). Hal itu dapat dilihat pula dengan jelas bagaimana intrusi oligarki itu, antara lain, masuk melalui dana-dana kampanye pemilihan yang pengelolaan dan pelaporannya tidak pernah diungkap secara terbuka.

Untuk mengatasi kelemahan ini, menurut Jeffrey, solusi yang dapat dilakukan saat ini ialah memotong satu generasi dan memberikan kesempatan perubahan itu kepada anak-anak muda. Mereka yang muda cenderung tidak memedulikan apa yang realistis dan apa yang tidak dapat dilakukan. Dengan kenaifan itu, mereka dapat melakukan suatu lompatan besar untuk mengatasi persoalan ini. Namun, sekali lagi Jeffrey mengingatkan, oligarki hanya dapat dikendalikan, tetapi tidak dapat dihapuskan sepenuhnya dalam pola relasi kuasa. (Jeffrey, 2014).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas diketahui bahwa Oligarki memiliki dampak yaitu: 1) Menghilangkan Hak Partisipasi Warga Negara, 2) Terancamnya Kesejahteraan Masyarakat. Oligarki akan sulit untuk dihapuskan sebab pelaku oligarki adalah orang-orang yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara dan partai politik dan bahkan aparat negarapun ada yang termasuk dalam kelompok pelaku oligarki. Akan tetapi Oligarki dapat dikendalikan salah satunya melalui pengawasan bersama antara negara, akademisi dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Elazhari, E., Tampubolon, K., Barham, B., & Parinduri, R. Y. (2021). Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 2 Tanjung Balai. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 1(1), 1-12.
- Elazhari, E., Tampubolon, K., Siregar, B., Parinduri, R. Y., & Prayoga, B. I. (2022). ZOMBIE COMPANIES IN THE CONTEXT OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN INDONESIA. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1).
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.

- Jeffrey A. Winters (2014), "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia". Dalam jurnal *Prisma*, Vol. 33 No. 1.
- Maura Rosita Hafizha (2023), Oligarki Adalah: Ciri, Dampak, dan Contohnya, url: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6611594>
- Parinduri, R. Y., Tampubolon, K., & Siregar, B. (2023). THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION ON TEACHER PERFORMANCE AT SMA NEGERI 1 SERBAJADI, SERBAJADI DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(1), 235-248.
- Roswirman Roswirman, ELAZHARI, Khairuddin Tampubolon(2021) Pengaruh Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru pada Era New Normal di SMK Swasta PAB 2 Helvetia; *AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS)*,V.1,no.4(hal.316-333).
- Rozaki, A. (2021). Islam, oligarki politik, dan perlawanan sosial. *IRCiSoD*.
- Tampubolon, K., & Sibuea, N. (2022). Peran Perilaku Guru dalam Menciptakan Disiplin Siswa. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(4), 1-7.
- Tampubolon, K., Elazhari, E., & Batu, F. L. (2021). Analisis dan Penerapan Tiga Elemen Sistem Pembelajaran pada Era Industri 4.0 di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(2), 153-163.
- Tampubolon, K., Karim, A., Batu, F. L., Siregar, B., & Saleh, K. (2022). Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Upaya Tindakan Preventif di Lokasi Wisata Theme Park Pantai Cermin. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 2(2), 1-8.
- Tampubolon, K., & Sibuea, N. (2023). THE INFLUENCE OF SUPERVISORY WORK MOTIVATION AND COMPETENCE ON THE PERFORMANCE OF SCHOOL SUPERINTENDENTS IN PADANGSIDIMPUAN CITY EDUCATION OFFICE. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(1), 249-261. Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Smp. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(2), 191-200.